

**PENGARUH KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI PEMERIKSA BPK
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TERHADAP KUALITAS
HASIL AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**



DIAJUKAN OLEH:

PUTU MIRA HASTA ANDIRA

126231031

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2024

LAPORAN TUGAS AKHIR
PENGARUH KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI PEMERIKSA BPK
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TERHADAP KUALITAS
HASIL AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH



DIAJUKAN OLEH:

PUTU MIRA HASTA ANDIRA
126231031

UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
UNTUK KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
PROFESI AKUNTAN

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024

**PENGARUH KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI PEMERIKSA BPK
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TERHADAP KUALITAS
HASIL AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

LAPORAN TUGAS AKHIR

DISUSUN OLEH:

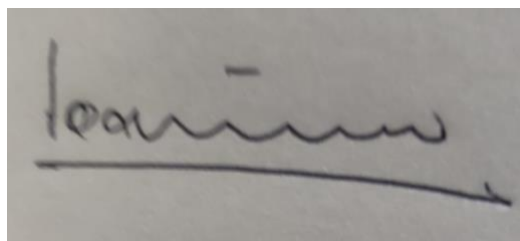


PUTU MIRA HASTA ANDIRA

126231031

DISETUJUI OLEH:

PEMBIMBING



Prof. Dr. SUKRISNO AGOES Ak., M.M.

10175004

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi dan independensi Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah terhadap kualitas hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Data penelitian ini diperoleh dari pembagian kuesioner yang disebar ke 53 responden. Responden pada penelitian ini ada Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi berpengaruh terhadap kualitas audit laporan keuangan pemerinah daerah.

Kata Kunci: Kompetensi, Independensi, Kualitas Audit

ABSTRACT

This research aims to examine the influence of the competence and independence of auditor at the BPK Representative Office of Central Sulawesi on the audit quality of local government financial statements. This research data was obtained through the distribution of questionnaires to 53 respondents. Respondents of this research are auditors at BPK Representative Office of Central Sulawesi. The method used in this research is multiple regression analysis. The results of the research show that competence and independence influence audit quality of local government financial statements.

Keywords: Competence, Independence, Audit Quality

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya, skripsi yang berjudul “Pengaruh Kompetensi dan Independensi Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Kualitas Hasil Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” dapat diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, IPU., ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Tarumanagara;
2. Dr. Sawidji Widoatmojo, S.E., M.M., MBA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara;
3. Dr. Jamaludin Iskak, SE, MSi, Ak, CA, CPA, CPI, ASEAN CPA. selaku Ketua Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanagara;
4. Prof. Dr. Sukrisno Agoes, Ak., M.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
5. Achmad Wirawan Yadin, yang telah membersamai dan banyak memberikan dukungan serta menjadi sarana diskusi yang luar biasa selama penulisan tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di PPA FEB Universitas Tarumanagara yang telah membantu selama proses perkuliahan serta telah memberikan ilmu dan pengetahuan dalam penulis menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Meskipun demikian, penulis tetap bertanggung jawab terhadap semua isi tugas akhir ini. Penulis berharap semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Palu,

Desember 2024

Putu Mira Hasta Andira

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan dan Manfaat	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Independensi	5
2.2 Kompetensi	5
2.3 Kualitas Audit	6
2.4 Penelitian Terdahulu.....	7
BAB III METODE PENELITIAN.....	8
3.1 Desain Penelitian.....	8
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	8
3.3 Populasi dan Sampel	8
3.4 Metode Pengumpulan Data	10
3.5 Teknik Analisis Data	10
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	13
4.1 Deskripsi Responden.....	13
4.2 Analisis Data	13
4.3 Pembahasan.....	18
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	22
5.1 Simpulan	22
5.2 Saran.....	22
REFERENSI	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Penelitian Terdahulu.....	7
Tabel 2 Deskripsi Responden.....	13
Tabel 3 Hasil Uji Validitas untuk Variabel X1 (Independensi)	14
Tabel 4 Hasil Uji Validitas untuk Variabel X2 (Kompetensi)	14
Tabel 5 Hasil Uji Validitas untuk Variabel Y (Kualitas Audit).....	14
Tabel 6 Hasil Uji Reliabilitas	15
Tabel 7 Hasil Uji Normalitas.....	15
Tabel 8 Hasil Uji Heteroskedasitas	16
Tabel 9 Hasil Uji Multikolinearitas.....	16
Tabel 10 Analisis Regresi Berganda.....	17
Tabel 11 Hasil Uji Statistik F	17
Tabel 12 Hasil Uji Statistik T	18
Tabel 13 Hasil Uji R-Square	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Penelitian	8
------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya mengimplementasikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel atas pengelolaan keuangan negara, pemerintah daerah menyusun laporan keuangan. Proses ini dimulai dari tahap perencanaan anggaran, dilanjutkan dengan tahap penganggaran, dan diakhiri dengan tahap pelaksanaan kegiatan. Setelah laporan keuangan selesai disusun, dokumen tersebut diserahkan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan.

BPK memiliki fungsi dalam memantau pengelolaan serta pelaporan tanggung jawab keuangan negara selaras dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, BPK melaksanakan evaluasi terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sebagai bentuk tanggung jawab publik. Pemerintah daerah diwajibkan menyerahkan laporan keuangan kepada BPK untuk diperiksa. Selanjutnya, BPK bertugas menjalankan pemeriksaan dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepada DPRD dalam kurun waktu dua bulan setelah menerima laporan keuangan tersebut.

Evaluasi yang dilakukan oleh BPK memberikan berbagai manfaat, di antaranya menyediakan penilaian audit yang independen, tidak memihak, dan terpercaya berdasarkan bukti yang memadai serta relevan. Selain itu, evaluasi BPK juga berfungsi memperkuat langkah pemberantasan korupsi melalui penyampaian temuan yang mengindikasikan pelanggaran hukum dan/atau kerugian negara kepada instansi terkait untuk diproses lebih lanjut, serta melalui upaya pencegahan dengan memperkuat sistem pengelolaan keuangan negara. Lebih jauh, evaluasi BPK dimaksudkan untuk dapat meningkatkan tanggung jawab, keterbukaan, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan serta pelaporan keuangan negara melalui rekomendasi yang bersifat membangun dan tindak lanjut yang optimal. Tidak hanya itu, BPK juga mendorong peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku dalam pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara, memperkuat peran APIP, dan pada akhirnya meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.

LHP atas LKPD yang dikeluarkan oleh BPK memuat opini dalam bentuk pernyataan profesional. Opini atau pernyataan profesional tersebut adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Pernyataan ini merupakan evaluasi independen mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yaitu: keselarasan dengan standar akuntansi pemerintahan, kelengkapan informasi yang disampaikan (*adequate disclosures*), ketaatan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, serta efektifitas SPI.

Hasil temuan yang dikemukakan oleh BPK digunakan oleh pihak-pihak berkepentingan sesuai dengan peran dan otoritas masing-masing untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan negara. Manfaat dari hasil audit BPK akan menurun secara signifikan jika tidak digunakan secara maksimal oleh para pihak berkepentingan. Maka sebab itu, BPK berkomitmen memastikan bahwa setiap laporan yang dihasilkannya selalu relevan dengan harapan dan kebutuhan pihak-pihak berkepentingan. Eksistensi BPK serta kelancaran pelaksanaan tugas yang dipercayakan kepada BPK sangat bergantung pada dukungan yang diberikan oleh pihak-pihak berkepentingan.

Kualitas hasil audit yang dihasilkan oleh BPK dipengaruhi langsung oleh Pemeriksa yang bertanggungjawab atas pelaksanaan audit. Pemeriksa BPK dituntut untuk menjunjung norma-norma profesi selama pelaksanaan tugas demi meraih mutu *output* pemeriksaan yang optimal. Adapun kode etik yang wajib dijunjung oleh Pemeriksa diatur dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) di antaranya yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme. Profesionalisme dalam hal ini mengacu pada kompetensi dan kehati-hatian profesional Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan.

Pemeriksa yang melakukan kesalahan dalam melakukan pemeriksaan tentu akan menimbulkan pertanyaan terkait apakah kesalahan tersebut terjadi karena murni kesalahan Pemeriksa yang gagal mendeteksi trik rekayasa dalam laporan keuangan atau kesalahan tersebut sengaja ditutupi oleh Pemeriksa karena adanya kepentingan tertentu.

Kesalahan yang timbul akibat dari kelalaian Pemeriksa adalah gagal dalam mendeteksi adanya kesalahan pelaporan keuangan, salah satunya disebabkan oleh

kompetensi dari Pemeriksa tersebut. Kompetensi yang dimaksud dalam hal ini adalah keahlian teknis, pemahaman terhadap standar akuntansi yang berlaku, serta pengalaman dalam melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan. Sedangkan, apabila permasalahannya adalah terkait kesalahan yang sengaja ditutupi, maka yang menjadi inti masalahnya adalah pada independensi. Independensi Pemeriksa yang dimaksud dalam hal ini mencakup objektivitas dan kebebasan keterikatan dengan pihak luar yang dapat memengaruhi hasil audit.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut tentunya akan berdampak pada kualitas dari hasil audit itu sendiri. Kualitas audit memiliki peran krusial karena audit dengan standar kualitas yang tinggi mampu menghasilkan laporan keuangan yang andal dan dapat dipercaya, sehingga menjadi acuan utama bagi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

Merujuk pada paparan persoalan di atas, maka penulis berminat untuk melakukan studi yang bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh dari kompetensi dan independensi pada Pemeriksa BPK yang merupakan auditor eksternal pemerintah pada BPK Perwakilan Sulawesi Tengah terhadap hasil audit laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga, dari uraian sebelumnya, mendorong penulis untuk memilih judul “Pengaruh Kompetensi dan Independensi Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Kualitas Hasil Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”.

1.2 Identifikasi Masalah

Setelah menganalisis latar belakang persoalan yang telah dipaparkan di atas, penulis mengidentifikasi sejumlah isu pokok mencakup “Bagaimana pengaruh kompetensi dan independensi Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah terhadap kualitas hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?”.

1.3 Batasan Masalah

Mengacu pada paparan latar belakang, objek kajian yang ditentukan adalah Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

1.4 Tujuan dan Manfaat

Sejalan dengan isu pokok yang telah dipaparkan di atas, maka maksud diadakannya studi ini ialah “Untuk mengetahui pengaruh kompetensi dan

independensi Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah terhadap kualitas hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.”

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak yaitu:

1. Mahasiswa dan Akademisi

Studi ini diharapkan mampu menambah wawasan, menyumbangkan pengetahuan ilmiah, serta menjadi acuan bagi studi-studi berikutnya dalam ranah serupa.

2. Peneliti

Studi ini diharapkan mampu menambah kekayaan pengetahuan ilmiah dan menyuguhkan pemahaman yang komprehensif terkait fenomena serta dampak kompetensi dan independensi Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah terhadap kualitas output pemeriksaan LKPD.

REFERENSI

- Adrian, Arfin. (2013). *Pengaruh Skeptisme Profesional, Etika, Pengalaman, dan Keahlian Audit terhadap Ketepatan Pemberian Opini oleh Auditor*. Riau: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang; Hal 1.
- Akbar B, dan Kartika A. (2015). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Independensi Auditor Di Jawa Tengah*. Jurnal: Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Auditor Pemerintahan*.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan*.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Cahaya N, A.A., Yaniartha, P.D. (2013). *Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Time Budget Pressure Terhadap Kualitas Audit*. Jurnal : Akuntansi.
- Imrana. (2018). *Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan)*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Permana, A. (2024). *Pengaruh Penerapan Etika Profesi, Skeptisme Profesional Dan Batasan Waktu Audit Terhadap Kualitas Audit Pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Papua*. Masters thesis, Universitas Tarumanegara.
- Rosalina, Amalia Dewi. (2014). *Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Pada Kantor Akuntan Publik di Bandung)*. Skripsi, Universitas Widyatama.
- Suraida, Ida. (2015). *Pengaruh Etika, Kompetensi, Pengalaman Audit Dan Risiko Audit Terhadap Skeptisme Profesional Auditor Dan Ketepatan Pemberian Opini Akuntan Publik*. Sosiohumaniora, Vol. 7, No. 3.